

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Merode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Akil Mochtar, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi, 2009.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2001.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Bagir Manan *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945*, Unsika, Karawang, 1993.
- _____, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta, 1994.
- _____, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Penerbit PSH Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Empat Tulisan tentang Hukum*, Program Pascasarjana BKU Hukum Ketatanegaraan, UNPAD, Bandung, 1995.
- Bernard L. Tanya (et. all), *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, 2010.
- Dahlan Thaib, *Teori dan Hukum Konstitusi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. II, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2005.
- Fred N. Klinger, *Asas-asas Penelitian Behavioral*, cetakan kelima Edisi Indonesia, Gjah Mada University Press, Yogyakarta, 1996.
- Jazim hamidi dan budiman NDP sinaga, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Sorotan* ,PT Tatanusa, Jakarta, 2005.
- _____, (et. all) *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*, PT Prestasi Pustakaraya, Jakarta, 2001.

- _____ (et. all) *Meneropong Legislasi di Daerah*, UM Press, Malang, 2008.
- Kansil, *Pokok-pokok pemerintahan di Daerah*, Aksara Baru, Jakarta, 1979.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu perundang-undangan dasar dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Maruarar Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Sinar Grafik, Jakarta, 2012.
- Muchamad Ali Safaat dkk, *Hukum Acara MK*, Sekretariat Jendral MK RI, Jakarta, 2011.
- Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang 1945*, Jilid I Yayasan Prapanca, Jakarta 1959
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Grafindo Persada, Jakarta 2005.
- _____, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan kesepuluh, Ghalia Indonesia Jakarta, 1995.
- P. Effendi Lotulung, *Beberapa Sistem Tentang Kontrol Segi Hukum Terhadap Pemerintah*, Bhuana Pancakarsa, Jakarta, 1986
- Ronny Hanitijio Soemitro, *Metodologi penelitian hukum dan Jurimetri*, Ghalian Indonesia, Jakarta, 1990.
- Rosjidi Ranggawidjaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998.
- Sarman dan Mohamad Taopik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Sri Soemantri M, *Hak uji material di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1997
- Soebechi, I.. *Judicial review peraturan daerah pajak & retribusi daerah*. Sina Grafika, Jakarta, 2012.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Cetaakan Ketiga, Yogyakarta, 1993.
- Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985.
- Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.

- _____, *Otonomi Daerah Yang Nyata dan Bertanggungjawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Tim Penyusun Hukum Acara MK. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MKRI, Jakarta, 2010.
- Victor M, Situmorang dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Rineka Cipta, Jakarta, 1999.
- Yance Arizona, *Karakter Perda SDA, Kajian Kritis Terhadap Struktur Formal Perda dan Konstruksi Hak Masyarakat Terkait Pengelolaan Hutan*, Huma, Jakarta, 2008.
- Yani, A, *Pembentukan peraturan perundangundangan yang responsif (Anotasi terhadap UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan)*. Cetakan I, Konstitusi Press, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Undang- Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengganti Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1970

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004

Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

C. Sumber Lainnya

Fajri Nursyamsi, 2015, *Pengawasan Peraturan Daerah Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vo. 2, No 3.

Jimly Asshiddiqie, *Otonomi Daerah Dan Parlemen Di Daerah*, www.mahkamahkonstitusi.go.id diunduh hari rabu 28 Februari 2018 jam 19.00 WIB

Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen tentang hukum*, <http://www.jimly.com> diunduh pada hari kamis 1 Maret 2018, pukul 16.00 WIB.

Maria farida, *hak uji materil mahkamah agung*, www.portaljustice.blogspot.com, diunduh pada hari kamis 1 Maret 2018, pukul 15.00 WIB.

Syahril syarbaini, *makna-dan-aktualisasi-sila-persatuan-indonesia-dalam-kehidupanbernegara*, <http://ueu5483.weblog.esaunggul.ac.id/2016/05/25/> diunduh pada hari kamis 1 Maret 2018, pukul 16.30 WIB.

PengertianProdukHukumDaerah:<https://hukumsetda.bulelengkab.go.id/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22> diunduh pada hari kamis 3 Mei 2018, pukul 16.00 WIB.

Nur Sholikin, *Putusan MK Momen Pemerintah Efektifkan Pengawasan Perda Bermasalah* <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt58ec93459830f/putusan-mk--momen-pemerintah-efektifkan-pengawasan-perda-bermasalah> diunduh pada hari kamis 5 Mei 2018, pukul 16.00 WIB.

Rudy Hendra Pakpahan, *Analisis Prosedur Pengujian Perda (Analysis Of Judicial Review Procedure Of Regional Regulation)*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 10 No. 1 Maret 2013, (Jakarta, Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan
Hak Asasi Manusia RI, 2013

Putusan Mahkamah Konstitusi No 137/PUU-XIII/2015

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 56/PPU-XIV/2016